

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Afrianto, Eddy 1996, Syamsuddin Adang Rivai, Dkk, *Kamus Istilah Perikanan*, Penerbit Kanisius, Bandung.
- Ali, Zainuddin, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andrisman, Tri 2011, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Arief, Barda Nawawi, 2002 *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Chazawi, Adam 2005, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Chomariyah, 2014, *Hukum Pengelolaan Konservasi Ikan*, Setara Press, Malang-Jatim,
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Friedman, Lawrence M, 2001, *American Law:An Introduction*, Tata Nusa, Jakarta.
- Hadjon, Philipus M, 2008, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Gadjah Mada University, Yogyakarta.
- Hamzah, Andi (3), 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya (1), 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hatta, Moh, 2009, *Beberapa Masalah Penegakkan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Hiariej, Eddy O.S, 2014, *Prinsip – Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Ilmar, Aminuddin, 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, Cetakan ke- 1, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Mahmudah, Nuning, 2015, *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Makaraao, Mohammad Taufik dan Suhasril, 2010, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Bogor.

- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Moeljatno, 2015, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad, Rusli 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, dilengkapi dengan 4 Undang-Undang di Bidang Sistem Peradilan Pidana*, UII Press, Yogyakarta.
- Packer, Herbert.L, 1964, *The Limits of The Criminal Sunction*, Stanford University Press, America.
- P.A.F Lamintang (1), 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prasetyo, Teguh, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditaman, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto(1), 2000. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Riyanto, Sigit, dkk, 2013, *Keterampilan Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Rodliyah dan Salim HS, 2017, *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*, Cetakan Ke-1, Rajawali Pers, Depok.
- Salam, Moch. Faisal, 2001, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung.
- Siombo, Marhaeni Ria, 2010, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sodik, Dikdik Mohamd, 2014, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1986, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 2013, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 15, Rajawali Pers, Jakarta.
- Subagyo, P.Joko, 2013, *Hukum Laut Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta
- Sukardi, 2009, *Penyidikan Tindak Pidana Tertentu*, Restu Agung, Jakarta.
- Sumardjono, Maria SW. 2014, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Univresitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Supriadi dan Alimuddin, 2011, *Hukum Perikanan di Indonesia*, Sinar Grafika, Palu.

Togat, 2008, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang.

Tribawono, Djoko 2002, *Hukum Perikanan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Cetakan Ke-3, Sinar Grafik, Jakarta.

Yanto, Nur, 2014, *Memahami Hukum Laut Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Bahan Peledak, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 1951.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara RI Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Lembaran Negara RI Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3260.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi United Nation of the Law of the Sea, Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3319.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Lembar Negara RI Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4439.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5073. Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Lembaran Negara RI Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4433.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan, Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5603.

- Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut (Bakamla), Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 380.
- Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satgas Pemberantasan *Illegal Fishing*, Lembaran Negara RI tahun 2015 Nomor 235
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Kelautan Indonesia, Lembaran Negara Nomor 32 Tahun 2017.
- Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.18/Men/2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor Per.13/Men/2005 Tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Di Bidang Perikanan.
- Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 45/Permen-Kp/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25/Permen-Kp/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2015-2019.
- Keputusan Menteri No. KEP/50/MEN/2012 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan *Illegal, Unreported And Unregulated (IUU) Fishing*
- Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 3a/Kepmen-Kp/2015 Tentang Satuan Tugas Pencegahan Dan Pemberantasan *Illegal, Unreported And Unregulated (IUU) Fishing*.
- Peraturan Bersama Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 1/Perber-Mkp/2015 Nomor: 37 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bersama Menteri Kelautan Dan Perikanan Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor Pb.02/Men/2012 Tahun 2012 Dan Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Dan Angka Kreditnya.

### **C. Karya Ilmiah**

- Abdul Muthalib Tahar dan Widya Krulinasari, 2014, Dosen Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Lampung “Pembagian kewenangan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Perairan Indonesia”, *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum Volume 6* No. 1 Januari 2013-April 2014.

- Brama, Michael, Dosen Fakultas Hukum Universitas Samratulangi, Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan, *Jurnal Ilmu Hukum Volume III No.8 Januari-Juni 2016*.
- Burhanudin, Asep, 2015, Bahan Kajian Dirjen PSDKP dalam Pelatihan Fisheries Crime Investigation, JCLEC, Semarang.
- Diamantina, Amalia, 2001, Penegakkan Hukum Pidana di Bidang Perikanan, *Tesis*, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hikmawati, Puteri, 2012, Peneliti Madya bidang Hukum Pidana pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Setjen DPR RI, “Permasalahan Hukum Dalam Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perikanan”, *Jurnal Negara Hukum Volume 3 No. 1 Juni 2012*.
- Iqbal, Fikri 2012, Penanggulangan Tindak Pidana di bidang Perikanan di wilayah Hukum Kabupaten Bantul, *Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Karuniati, Siti Dwi , 2016, Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Oleh Penyidik Perwira Tni Angkatan Laut Terhadap Pelaku Tindak Pidana Di Bidang Perikanan (Studi pada Pangkalan TNI Angkatan Laut Lampung), *Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Lampung
- Khairi, Mawardi, Penelitian Fakultas Hukum Borneo Tarakan-Kalimantan Utara, “Politik Hukum Pemerintah Pemerintah Dalam Penangan Tindak Pidana Perikanan (Illegal Fishing) di Indonesia”, *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum Volume 10 Issue 2, April-June 2016*.
- Lapian, Adri, Dikutip dari Materi Seminar Hukum Nasional oleh Achmad Santosa, 12 Agustus 2017, Kebijakan Pemberantasan *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Mawitjere, Pricillia Stephanie, 2016, Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana di Bidang Perikanan di Provinsi Sulawesi Utara, *Tesis*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Packer, Herbert L, *Two Models of The Criminal Process*, University of Pennsylvania Review (Founded 1852 Formerly American Law Register), Volume 113 Number November 1964).
- Pratama, Bintang, 2016, Tindakan Penegakkan Hukum sebagai Upaya Penanggulangan terhadap Kapal Asing yang melakukan Illegal,

Unreported and Unregulated di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia Menurut Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982), *Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Puslitbang-SHN, BPHN, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2015, Laporan Akhir Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Bidang Perikanan, Jakarta.

Puslitbang-SHN, BPHN, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2016, Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Pemberantasan Kegiatan Perikanan Liar (IUU Fishing), Jakarta.

Puspitasari, Farida, 2006, Penegakkan Hukum Tindak Pidana Perikanan di Wilayah Laut Indonesia dalam Ketiadaan Satu Komando, *Tesis*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Samiaji, Ranu, 2016, Harmonisasi Kewenangan Lembaga Negara Dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Fishing* Di Perairan Indonesia, *Tesis*, Universitas Brawijaya, Malang. .

Tobing, Raida, dkk, 2006, Penelitian Laporan Penelitian Tentang Penegakan Hukum di Perairan Indonesia dan Zona Tambahan, BPHN Dep. Kehakiman, Jakarta.

Wiranto (Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan), 2018, Materi Seminar Nasional oleh Koalisi Bersama Rakyat, Keamanan dan Keselamatan laut dalam Mewujudkan Poros Maritim Dunia, Hotel Borobudur Jakarta Pusat.

#### **D. Internet**

Devi Darmawan “Disparitas Putusan Pengadilan Perikanan”, <https://media.neliti.com/media/publications/10562-ID-disparitas-putusan-pengadilan-perikanan-terhadap-tindak-pidana-kejahatan-bidang.pdf>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2017.

Dinas Kelautan dan Perikanan, “Terbitkan Peraturan Menteri tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan”, <http://groups.yahoo.com/group/lingkungan/message/23995>, diakses tanggal 10 Februari 2018.

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, “Penyidik Integrasikan Data Tindak Pidana Perikanan”, <https://data-tpnasiona.kkp.go.id/read/forum-koordinasi-penanganan-perkara-tindak-pidana-perikanan>, diakses pada tanggal 22 Agustus 2017.

- “Jalesveva Jayamahe”, [https://id.wikipedia.org/wiki/Jalesveva\\_Jayamahe](https://id.wikipedia.org/wiki/Jalesveva_Jayamahe), *Jalesveva Jayamahe* adalah artinya di laut justru kita jaya, diakses pada tanggal 22 Agustus 2017.
- Justisia, Fiat Abdul Muthalib Tahar “Pembagian Kewenangan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Di Perairan Indonesia”, <https://media.neliti.com/media/publications/36927-ID-pembagian-kewenangan-dalam-penegakan-hukum-terhadap-pelanggaran-peraturan-perund.pdf>, diakses pada tanggal 18 Februari 2018.
- “Konversi energi termal”, [https://id.wikipedia.org/wiki/Konversi\\_energi\\_termal\\_lautan](https://id.wikipedia.org/wiki/Konversi_energi_termal_lautan), diakses pada tanggal 22 Agustus 2017.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Negeri Tilamuta Kelas II, “Hukum Acara Pengadilan Perikanan dan Tindak Pidana Perikanan”, <http://pn-tilamuta.go.id/2016/05/23/hukum-acara-pengadilan-perikanan-dan-tindak-pidana-perikanan/>, diakses pada tanggal 14 September 2017.
- Negara Hukum, “Kewenangan dan Wewenang”. <http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-kewenangan.html>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2017.
- Puslitbang-SHN, 2015, BPHN, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, “Laporan Akhir Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Bidang Perikanan”, hlm. 53-54. [http://www.bphn.go.id/data/documents/ae\\_perikanan\\_2015.pdf](http://www.bphn.go.id/data/documents/ae_perikanan_2015.pdf), diakses pada tanggal 3 Maret 2018.
- Risalah Rapat-Rapat Kerja Komisi III DPR RI Bidang Hukum, Perundang-Undangan, HAM Dan Keamanan Dengan Kepala Kepolisian Negara Republik. Indonesi, <http://www.pdfsearchengine.net/>, diakses pada tanggal 20 Februari 2018.
- Sumber: BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Provinsi Sulawesi Tenggara, “Keadaan Geografis Provinsi Sulawesi Tenggara”, [https://www.bappeda.go.id/data/documents/ae\\_meteorologi-laut/keadaan-umum-sulawesi-tenggara/](https://www.bappeda.go.id/data/documents/ae_meteorologi-laut/keadaan-umum-sulawesi-tenggara/), diakses pada tanggal 5 Maret 2018.

## E. Wawancara

Wawancara dengan Asmad. S.T.P., M.H, Kapten Laut Polisi Militer PASPOTMAR (Perwira Staf Potensi Maritim) LANAL Kota Kendari, Pada tanggal 22 Januari 2018.



Wawancara dengan Kombes Pol. Andi Anugrah, S.I.K, Direktur Polisi Air  
Polda Sulawesi Tenggara, Pada tanggal 24 Januari 2018.

Wawancara dengan Muhamad Iman Botji, S.Pi, PPNS (Penyidik Pegawai  
Negeri Sipil) Perikanan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi  
Sulawesi Tenggara, Pada tanggal 5 Februari 2018.

Wawancara dengan Asep Rahmat Hidayat, S.Pi, PPNS (Penyidik Pegawai  
Negeri Sipil) Perikanan di Direktorat Jenderal P2SDKP  
(Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan  
Perikanan) Kota Kendari, Pada tanggal 7 Februari 2018.